

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Perpustakaan Umum

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang mempunyai tugas melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan tingkatan usia, tingkatan sosial, dan tingkat pendidikan. Perpustakaan Lazimnya berada pada setiap kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan yang mempunyai koleksi bersifat umum dan berfungsi melayani seluruh lapisan masyarakat di sekitarnya, (sutarno, 2008).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang seluruhnya atau sebagian dari dananya disediakan oleh masyarakat dan penggunaannya tidak terbatas pada kelompok tertentu dan bebas digunakan oleh siapapun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43, 2007 pasal 1 yang berbunyi: “Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.” Perpustakaan umum didirikan untuk melayani semua anggota masyarakat yang memerlukan jasa informasi dan perpustakaan, oleh sebab itu perpustakaan umum bersifat terbuka untuk umum dan dibiayai dengan menggunakan dana dari masyarakat umum, dengan memberikan jasa pelayanan yang bersifat cuma-cuma. (Rahayuningsih, 2013, p. 4).

Adapun pendapat lain menjelaskan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diselenggarakan atau dibiayai dengan menggunakan dana umum. (Yulia & Sujana, 2009, p. 20). Pendapat lain menyatakan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas dalam kegiatan mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustaka agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Zahara, 2004, p. 7).

Adapun pengertian perpustakaan umum menurut Sutarno (2003: 32) perpustakaan umum adalah Lembaga pendidikan yang sangat demokratis karena menyediakan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan melayaninya tanpa membedakan suku bangsa, agama yang dianut, jenis kelamin, latar belakang dan tingkat sosial, umur dan pendidikan serta perbedaan lainnya. Pendek kata perpustakaan umum memberikan

layanan kepada semua orang, anak-anak, remaja, dewasa, pelajar, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, para usia lanjut, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan Sjahrial Pamuntjak (2000: 3) menyatakan bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang menghimpun koleksi buku bahan cetakan serta rekaman lain untuk kepentingan masyarakat umum.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibuat untuk masyarakat umum yang tidak memandang suku, ras, agama dan kehidupan ekonominya yang berguna untuk mencerdaskan masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Perpustakaan Umum

Tujuan perpustakaan umum yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa memandang latar belakang pendidikan, agama, adat istiadat, umur, jenis dan lain sebagainya, dengan menyediakan berbagai macam sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemustaka yang bertujuan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan wawasan manusia. (Zahara, 2004, p. 15). Adapun fungsi perpustakaan umum menurut (Sutarno, 2006, p. 43) yaitu “perpustakaan umum berfungsi melayani semua lapisan masyarakat dalam rangka memperoleh dan meningkatkan berbagai ilmu pengetahuan.” Selain itu, terdapat salah satu prinsip Ranganathan pada bagian ke empat yaitu *Save The Time Of The Reader* (Hemat waktu untuk pembaca). Pada prinsip ini, adanya kemudahan akses yang diberikan kepada pemustaka merupakan prioritas utama dalam melayani pemustaka di perpustakaan. Dengan adanya database di perpustakaan dapat memudahkan pustakawan dalam mengembangkan perpustakaan dan juga memudahkan pemustaka dalam mengakses berbagai macam informasi secara cepat dan efisien di perpustakaan.

3. Sistem Informasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Menurut (Yunaeti, 2017, p. 22) sistem informasi adalah suatu sistem yang menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan, dimana sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sedangkan menurut Kenneth C. Laudon, sistem informasi merupakan satuan komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali dalam suatu organisasi. Sistem informasi juga sebagai pendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali, sistem informasi dapat juga membantu para manajer dan karyawan untuk meneliti permasalahan, memvisualisasikan pokok-pokok yang kompleks, dan menciptakan produk-produk baru. (Laudon, 2006, p. 18).

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasanya sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang cerdas.

a. Sistem Informasi Perpustakaan

Sistem informasi perpustakaan dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu/terintegrasi, untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah perpustakaan, fokus sistem informasi perpustakaan adalah untuk mendukung layanan secara efektif bagi pengguna, manajemen pengadaannya, dan secara umum manajemen layanan-layanan yang diberikan oleh perpustakaan dan badan-badan lainnya yang menyelenggarakan akses terhadap koleksi dokumen. (Habiburrahman, 2016, p. 12)

Sistem Informasi Perpustakaan merupakan sistem yang dibuat untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola suatu perpustakaan. Semua diproses secara komputerisasi yaitu digunakannya PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang keanggotaan, ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku dan pengembalian buku. Dengan sistem ini, peminjam buku maupun yang mengembalikan buku tidak perlu menunggu lama untuk proses peminjaman/pengembalian buku. Petugas perpustakaan pun tidak akan mengalami kesulitan dalam proses pelaporan kepada kepala perpustakaan.

Sistem informasi perpustakaan disebut juga sebagai sistem automasi perpustakaan. Di dalam sistem perpustakaan terdapat modul-modul yang terintegrasidari sistem yang satu ke sistem yang lain. Adapun modul-modul yang dapat terintegrasi yaitu: (Habiburrahman, 2016, p. 14)

a) Modul pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan pokok dari perpustakaan atau pusat dokumentasi karena kegiatan ini mengusahakan buku-buku yang dibutuhkan ada dalam koleksi. Modul pengadaan ini berfungsi untuk membuat daftar usulan buku dan daftar pengadaan buku.

b) Modul pengatalogan

Katalog adalah daftar barang yang berada pada suatu tempat, sedangkan katalog perpustakaan adalah daftar bahan pustaka yang ada dalam perpustakaan. Tujuannya adalah untuk memudahkan para anggota perpustakaan untuk mengetahui koleksi perpustakaan dengan cepat. Adapun fungsi modul pengatalogan adalah untuk mengelola data koleksi buku maupun koleksi berkala.

c) Modul keanggotaan

Keanggotaan perpustakaan sangat perlu untuk mempermudah pengguna dalam meminjam koleksi perpustakaan. Untuk pengurusan keanggotaan setiap perpustakaan memiliki kebijakan sendiri. Modul keanggotaan berfungsi untuk mengelola data anggota seperti penambahan, pengeditan dan penghapusan data anggota.

d) *OPAC*

Automasi perpustakaan akan memudahkan pemustaka dalam menelusuri informasi khususnya katalog melalui *OPAC*. Pemustaka dapat menelusur suatu judul buku secara bersamaan. Disamping itu, mereka juga dapat menelusur buku dari berbagai pendekatan, misalnya melalui judul, kata kunci pengarang, subyek, kata kunci subyek dan sebagainya. Sedangkan apabila menggunakan katalog manual, pemustaka hanya dapat akses melalui tiga pendekatan yaitu judul, pengarang, dan subyek. (Habiburrahman, 2016, p. 17)

b. Tujuan Sistem Informasi Perpustakaan

Tujuan Sistem Informasi Perpustakaan Menurut John Corbin tujuan sistem informasi perpustakaan antara lain:

1. Mempercepat layanan informasi yang diberikan

2. Meringankan beban tugas pustakawan/ staf perpustakaan terhadap pekerjaan yang bersifat pengulangan rutin (klerikal)
3. Menghemat waktu dan tenaga sehingga memberikan hasil kerja yang konsisten
4. Meningkatkan kerjasama antar layanan/ bagian ataupun antar perpustakaan
5. Memberikan layanan yang lebih efektif kepada pemakai : (John Corbin, 1985)

Menurut Cochrane seperti yang dikutip Sulistyoyo Basuki, bahwa tujuan sistem informasi perpustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan
- 2) Memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan
- 3) Membantu menghindari duplikasi kegiatan di perpustakaan
- 4) Menghilangkan pekerjaan yang bersifat mengulang (repetitif)
- 5) Membantu perpustakaan memperluas jasa perpustakaan
- 6) Menimbulkan berbagai peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan
- 7) Dapat meningkatkan efisiensi: (Sulistyo Basuki, 1998).

c. Manfaat Sistem Informasi Perpustakaan

Manfaat dari penerapan sistem informasi pada perpustakaan dapat Mengefisiensikan dan mempermudah pekerjaan dalam perpustakaan. Memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna perpustakaan. Meningkatkan citra perpustakaan. Pengembangan infrastruktur nasional, regional dan global.

Penggunaan sistem informasi disebut perpustakaan sangat berperan penting di zaman digital pada saat ini. Karena sistem informasi dapat membantu pustakawan dan pemustaka dalam mengelola serta mengakses dengan cepat yang hanya menggunakan jaringan internet setiap lapisan masyarakat dapat menggunakan sistem informasi kapan saja dan dimana saja tanpa ruang dan waktu.

d. Konsep

Konsep Sistem Sistem Informasi Perpustakaan merupakan sistem yang dibuat untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam mengelola suatu

perpustakaan. Semua diproses secara komputerisasi yaitu digunakannya PHP sebagai bahasa pemrograman dan MySQL sebagai database. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang keanggotaan, ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku dan pengembalian buku. Dengan sistem ini, peminjam buku maupun yang mengembalikan buku tidak perlu menunggu lama untuk proses peminjaman/ pengembalian buku.

4. Automasi Perpustakaan

Automasi Perpustakaan adalah sebuah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan Teknologi informasi (TI). Sistem Otomasi Perpustakaan atau *Library Automation System* adalah *software* yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan. Dengan bantuan Teknologi informasi maka beberapa pekerjaan manusia dapat dipercepat dan diefisienkan. Selain itu proses pengolahan data koleksi menjadi lebih cepat dan akurat untuk ditelusur kembali. (Harmawan, 2016, p. 11)

Sistem automasi Perpustakaan atau *Library Automation System* adalah *software* yang beroperasi berdasarkan pangkalan data untuk mengotomasikan kegiatan perpustakaan. Pada umumnya *software* yang digunakan untuk otomasi perpustakaan menggunakan model "*relational database*". *Database* atau pangkalan data merupakan kumpulan dari suatu data. Dalam perpustakaan paling tidak ada dua pangkalan data yaitu data buku dan data pemustaka. Disebut "*relational database*" karena dua pangkalan data tersebut akan saling dikaitkan apabila terjadi transaksi, misalnya, pada saat terjadi proses peminjaman dan pengembalian buku. Kebanyakan sistem automasi perpustakaan memisahkan fungsi *software* kedalam program tersendiri disebut modul. Sedangkan modulnya terdiri dari modul pengadaan, katalogisasi, sirkulasi, serial, dan *Online Public Access Catalog (OPAC)*. Sistem automasi Perpustakaan di Indonesia pada umumnya hanya mempunyai tiga modul yaitu katalogisasi, sirkulasi, dan *OPAC* dan ini merupakan modul minimal yang harus dimiliki oleh perpustakaan untuk kepentingan automasi. Modul-modul tersebut merupakan sistem yang sudah terintegrasi sehingga istilah sistem automasi perpustakaan juga sering disebut dengan sistem perpustakaan terintegrasi (*Integrated Library System*).

a. Komponen Automasi Perpustakaan

Menurut (Arif 2003, p. 26) sebuah Sistem Automasi Perpustakaan pada umumnya terdiri dari Tiga bagian, yaitu :

1) Pangkalan Data

Setiap perpustakaan pasti tidak akan terlepas dari proses pengelolaan koleksi. Tujuan dari proses ini untuk memperoleh data dari semua koleksi yang dimiliki dan kemudian mengorganisirnya dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmu perpustakaan. Pada sistem manual, proses ini dilakukan dengan menggunakan bantuan media kertas atau buku. Pencatatan pada kertas atau buku merupakan pekerjaan yang sangat mudah namun juga merupakan suatu proses yang tidak efektif karena semua data yang telah dicatat akan sangat sulit ditelusur dengan cepat jika jumlah sudah berjumlah besar walaupun kita sudah menerapkan proses pengindeksan. Dengan menggunakan bantuan teknologi informasi, proses ini dapat dipermudah dengan memasukkan data pada perangkat lunak pengolah data seperti :CDS/ISIS(WINISIS), MySQL dan sebagainya. Perangkat lunak ini akan membantu kita untuk mengelola pangkalan data, ini menjadi lebih mudah karena proses pengindeksan akan dilakukan secara otomatis dan proses penelusuran informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena perangkat lunak ini akan menampilkan semua data sesuai kriteria yang kita tentukan.

2) User/Pengguna

Sebuah sistem automasi tidak terlepas dari pengguna sebagai penerima layanan dan seorang atau beberapa operator sebagai pengelola sistem. Pada sistem automasi perpustakaan terdapat beberapa tingkatan operator tergantung dari tanggung jawabnya. Dalam setiap program aplikasi, *user* mempunyai tingkatan yang berlainan. Misalnya di dalam *otomigenx* (aplikasi Automasi Perpustakaan Buatan Perpustakaan ITB) *user* dibagi menjadi dua yaitu administrator dan nonadministrator. Pengguna merupakan unsur utama dalam sebuah sistem automasi perpustakaan. Dalam pembangunan sistem perpustakaan hendaknya selalu dikembangkan melalui konsultasi dengan pengguna-penggunanya yang meliputi pustakawan, staf yang nantinya sebagai operator atau teknisi serta para anggota perpustakaan. Automasi Perpustakaan baru bisa dikatakan baik bila memenuhi kebutuhan pengguna baik staf maupun anggota perpustakaan. Tujuan daripada sistem automasi perpustakaan adalah untuk memberikan manfaat kepada pengguna. Konsultasikan dengan pengguna untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan

mereka. Namun, perlu hati-hati terhadap penilaian keliru yang dilakukan oleh pengguna mengenai kebutuhan dan persepsi tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh suatu sistem komputer . Kebutuhan dapat dirincikan terlalu banyak atau terlalu sedikit dan kadang-kadang persepsi bisa juga keliru. Staf yang bersangkutan harus dilibatkan mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan sistem. Masukkan dari masing-masing staf harus dikumpulkan untuk menjamin kerjasama mereka. Tenaga-tenaga inti yang dilatih untuk menjadi operator, teknisi dan administrator sistem harus diidentifikasi dan dilatih sesuai bidang yang akan dioperasikan. (Arif, 2003, p. 28)

b. Perangkat Automasi

Perangkat automasi yang dimaksud disini adalah perangkat atau alat yang digunakan untuk membantu kelancaran proses automasi. Perangkat ini terdiri dari dua bagian, yaitu (Hartono, 2017, p. 19):

1) Perangkat Keras (*Hardware*)

Sebelum memulai proses automasi, sebuah perangkat keras perlu disiapkan. Yang dimaksud perangkat keras disini adalah sebuah komputer dan alat bantu seperti *Printer, Barcode, Scanner*, dan sebagainya. Empat buah komputer sudah cukup untuk digunakan di dalam memulai proses automasi pada perpustakaan kecil dalam hal ini perpustakaan sekolah. Sedangkan untuk perpustakaan besar, diperlukan lebih banyak komputer dan pelengkap agar pelayanan kepada pengguna menjadi lancar. Spesifikasi minimal biasanya tergantung dari *software* yang digunakan. Misalnya, *software* senayan (program automasi perpustakaan buatan Diknas RI) minimal menggunakan pentium III. Sebab semakin banyak tampilan berbasis grafis (gambar) maka semakin membutuhkan spesifikasi yang tinggi. (Hartono, 2017, p. 22)

2) Perangkat Lunak Automasi (*Software*)

Sebuah perpustakaan yang hendak menjalankan proses automasi maka harus ada sebuah perangkat lunak sebagai alat bantu. Perangkat lunak ini mutlak diperlukan keberadaannya karena digunakan sebagai alat bantu mengefisienkan dan mengefektifkan proses. Ada tiga cara untuk memperoleh perangkat lunak, antara lain (Hartono, 2017, p. 24) :

- a) Membangun sendiri dengan bantuan seorang *developer* perangkat lunak. Jika instansi Anda mempunyai tenaga programmer maka langkah pertama ini bisa dilakukan karena dapat menghemat biaya membeli perangkat lunak automasi.
- b) Menggunakan perangkat lunak gratis, misalnya : *CDS/ISIS*, *WinISIS*, *KOHA*, *OtomigenX*, *Senayan Library*, dan sebagainya. Perangkat lunak ini bisa didapatkan dari internet karena didistribusikan secara gratis kepada semua saja yang memerlukan. Walaupun gratis perangkat lunak ini masih banyak kekurangan dan masih harus dimodifikasi lebih lanjut agar memenuhi sesuai dengan kebutuhan masing-masing perpustakaan.
- c) Membeli perangkat lunak komersial beserta training dan supportnya yang dibangun oleh pihak ketiga. Perangkat lunak komersial, merupakan hasil riset pengembangnya dan mudah untuk diimplementasikan karena hanya perlu dilakukan perubahan fitur sedikit atau tidak sama sekali. *Training* dan *Support* selama beberapa periode waktu juga akan diberikan oleh vendor secara penuh sehingga pengguna dapat langsung menggunakan tanpa harus bersusah payah lagi. Pilihan ini dapat dipilih jika terdapat dana yang mencukupi untuk membeli perangkat lunak.

Pilihan *software* yang dapat digunakan harus:

- a. Sesuai dengan keperluan
- b. Memiliki izin pemakaian
- c. Ada dukungan teknis, pelatihan, dokumentasi yang relevan serta pemeliharaan.
- d. Menentukan staf yang bertanggungjawab atas pemilihan dan evaluasi software. (Hartono, 2017, p. 24)

c. Alasan Menggunakan Automasi Perpustakaan

Menurut (Hartono, 2017, p. 25) ada beberapa hal yang menjadi sebab akibat kita melakukan atutomasi di perpustakaan, yaitu sebagai berikut:

- a) Tuntutan Terhadap Jumlah Jenis-Jenis Layanan dan Mutu Layanan Perpustakaan

Untuk saat ini kepuasan pemustaka tidak hanya dilihat dari layanan baca ditempat dan peminjaman buku perpustakaan saja. Akan tetapi, pemustaka sekarang ini sudah menuntut jenis-jenis layana lain, seperti layanan informasi terbaru, layanan informasi terseleksi, layanan penelusuran secara *online*, layanan penelusuran dengan *CD-ROM*. Begitu juga dengan kualitas layanan perpustakaan yang harus bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan, misalnya dengan memberikan alternatif informasi/artikel atau menunjukkan dimana informasi tersebut dapat diperoleh dengan bantuan pustakawan. (Hartono, 2017, p. 25)

b) Tuntutan Terhadap Penggunaan Koleksi Secara Bersamaan (*Resouce Sharing*)

Seperti yang kita ketahui, antara perpustakaan yang satu dengan perpustakaan yang lainnya tidak bisa memenuhi koleksinya sendiri, karena perpustakaan akan saling membutuhkan koleksi perpustakaan yang lain guna untuk memberikan layanan yang memuaskan kepada pemustakanya. Oleh karena itu, penggunaan bersama koleksi perpustakaan sangat membantu dalam memberikan pelayanan.

c) Kebutuhan Untuk Mengefektifkan Sumber Daya Manusia

Untuk mempertahankan mutu pelayanan perpustakaan, dimana Sumber daya manusia semakin berkurang maka kita dapat mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk melayani peminjaman bahan pustaka yang tadinya diperlukan tiga sampai lima orang, dapat digantikan dengan satu unit komputer yang dioperasikan oleh satu orang saja. Dengan efisiensi tenaga seperti ini maka perpustakaan dapat memikirkan dan mengalokasikan tenaga untuk menyelenggarakan layanan-layanan lain yang dapat diberikan kepada pemakai.

d) Tuntutan Terhadap Efisiensi Waktu

Dahulu pemustaka mungkin sudah puas dengan layanan penelusuran artikel apabila artikel-artikel dapat ditemukan sekalipun layanan tersebut memakan waktu cukup lama. Sekarang pemakai mungkin menuntut layanan tersebut hampir instant. Saat ini, *review* diajukan, saat itu pula jawaban diharapkan bisa diterima. Layanan yang demikian ini bisa dipenuhi hanya dengan bantuan teknologi komputer. Pemakai dapat mengirimkan permintaannya melalui *Elektronik Mail (E-Mail)* yang pada saat itu pula

dapat diterima oleh perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan melakukan akses ke pangkalan data/informasi yang ada di komputer baik di perpustakaan atau di perpustakaan lain. Jawaban yang diperoleh hanya dalam beberapa saat kemudian dikirim kembali kepada si penanya dengan menggunakan *E-Mail* yang dalam waktu singkat dapat diterima oleh si penanya.

e) **Kebutuhan Akan Ketepatan Layanan Informasi**

Selain kecepatan dalam memperoleh informasi, pemustaka juga membutuhkan ketepatan informasi yang didapatkannya dari perpustakaan. *Review-review* tentang informasi secara spesifik harus bisa dijawab secara spesifik pula. Dengan bantuan teknologi komputer, *review-review* ini bisa dijawab dengan cepat dan tepat.

f) **Keragaman Informasi yang Dikelola**

Informasi yang ada di perpustakaan saat ini tidak hanya terbatas kepada buku dan jurnal ilmiah saja. Informasi-informasi lain seperti *audio visual*, *multimedia*, bahan mikro dan sebagainya saat ini juga dikoleksi oleh perpustakaan. Banyak koleksi perpustakaan yang harus di baca dengan menggunakan teknologi komputer. Oleh karena itu, untuk mengelola informasi yang sangat beragam tersebut bantuan alat terutama teknologi komputer.

d. Tujuan Otomasi Perpustakaan

Otomasi perpustakaan diperlukan untuk meningkatkan mutu layanan kepada pemustaka dan dapat meningkatkan kemampuan perpustakaan agar dapat mengikuti pertumbuhan koleksi, transaksi, dan resource sharing dengan perpustakaan lainnya. Menurut Harmawan (2009: 6-7). Tujuan otomasi perpustakaan sebagai berikut:

- a. Mengatasi keterbatasan waktu
- b. Mempermudah akses informasi dari berbagai pendekatan misalnya dari judul, kata kunci judul, pengarang, kata kunci pengarang dan sebagainya.
- c. Dapat dimanfaatkan secara bersama-sama
- d. Mempercepat proses pengatalogan, peminjaman dan pengembalian
- e. Memperingan pekerjaan
- f. Meningkatkan layanan

- g. Memudahkan dalam pembuatan laporan statistic
- h. Menghemat biaya
- i. Menumbuhkan rasa bangga
- j. Mempermudah dalam pelayanan untuk kepentingan akreditasi Dalam perkembangannya menurut Corbin (1985: 9-14) membagi metode otomasi perpustakaan atas 4 (empat), yaitu:
 - a. Membeli sistem jadi (turnkey system)
 - b. Mengadaptasi sistem dari perpustakaan lain (adapted system)
 - c. Mengembangkan atau membangun sistem lokal (locally developed system), dan
 - d. Memanfaatkan sistem secara bersama (shared systems)

Keempat metode atau cara tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi perpustakaan harus dapat menggunakan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan, untuk memilih dan menentukan metode mana yang sesuai dengan kondisinya. Selanjutnya, Allan (1986: 46) mengungkapkan sistem otomasi perpustakaan dari segi penerapannya, dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Sistem automasi perbagian,
- b. Sistem auotomasi semi terintegrasi, dan
- c. Sistem terintegrasi secara penuh (fully integrated library systems).

Cakupan teknologi informasi Teknologi informasi memiliki tiga komponen yang utama, yaitu perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan brainware. Dari ketiga komponen utama inilah maka cakupan teknologi informasi menjadi luas. Menurut Sulistyو Basuki, yang termasuk teknologi informasi adalah:

- a. Telekomunikasi
- b. Sistem Komunikasi Optik
- c. Sistem pita-video dan cakram-video
- d. Komputer, termasuk visi komputer, lingkungan data dan sistem pakar.
- e. Mikrobentuk
- f. Komunikasi suara dengan bantuan computer
- g. Jaringan kerja data
- h. Surat elektronik
- i. Videoteks dan Teleteks. (Sulistyo-Basuki, 1993: 87)

Adapun bidang cakupan otomasi layanan perpustakaan dengan menggunakan teknologi informasi dapat menjalankan sistem layanan secara otomatis mulai dari usulan koleksi, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi (reserve, inter-library loan), pengelolaan penerbitan berkala dan pengelolaan anggota (Mukhsin, 2008, hal. 38)

e. Manfaat Automasi Perpustakaan

Dengan adanya otomasi perpustakaan akan memperingan pekerjaan staf perpustakaan dan memudahkan pemustaka dalam memanfaatkan perpustakaan. Automasi perpustakaan akan menjadikan pekerjaan dan layanan perpustakaan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat. Penerapan otomasi perpustakaan di Indonesia pada umumnya hanya mempunyai tiga modul yaitu katalogisasi, sirkulasi dan *Online Public Access Catalogue (OPAC)*. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan di atas uraian berikut hanya menitikberatkan pada tiga hal tersebut. (Wardiana, 2002, p. 33)

1) Memudahkan dalam Pembuatan Katalog

Perpustakaan yang belum menerapkan otomasi pada umumnya harus membuat kartu katalog agar pemustaka dapat menemukan sebuah buku yang diketahui berdasarkan pengarang, judul atau subyeknya dan menunjukkan buku yang dimiliki perpustakaan. Penerapan komputer akan dapat menghemat waktu dalam proses pembuatan katalog akan lebih mudah serta penyajian buku bagi pemustaka juga akan lebih cepat dan efisien.

2) Memudahkan dalam Layanan Sirkulasi

Dengan adanya komputer, pekerjaan peminjaman buku dapat dilakukan dengan cepat dan mudah yaitu hanya dengan menyorot "barcode" kartu kemudian menyorot "barcode" selanjutnya memberikan cap tanggal pengembalian. Pekerjaan tersebut tidak memakan waktu yang lama. Begitu juga dalam proses pengembalian buku dan perpanjangan buku, cukup dengan menyorot barcode buku kemudian secara otomatis akan terjadi transaksi.

3) Memudahkan Dalam Penelusuran Melalui Katalog

Automasi perpustakaan akan memudahkan pemustaka dalam menelusur informasi khususnya katalog melalui *OPAC (Online Public Access Catalog)*. Pemustaka dapat menelusur suatu judul buku secara

bersamaan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa automasi perpustakaan sangat bermanfaat baik bagi pengelola perpustakaan, perpustakaan maupun pemustaka. Sebab, automasi perpustakaan dapat mengefektifkan waktu yang dapat mempercepat proses pengolahan, peminjaman dan pengembalian. Selain itu, automasi perpustakaan juga dapat meringankan pekerjaan pihak pustakawan dan memudahkan pemustaka dalam menelusur sebuah informasi yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.

Sebagaimana dari Anas bin Malik, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda:

اللَّهُمَّ لَسَهْلًا لِأَمَّا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ جَعَلْتَهُ حَزْرًا نَادَا شَيْئًا سَهْلًا

Artinya: “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.”

f. Konsep Automasi Perpustakaan

Dalam konsep teknologi informasi dan komunikasi bahwa automasi perpustakaan merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk Mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan di akses secara global (Wardiana, 2002, p. 38).

Perpustakaan saat ini dituntut mampu berubah mengikuti perubahan sosial pemustakanya. Perkembangan teknologi informasi telah banyak mengubah karakter pemustakanya. Perubahan dalam kebutuhan informasi dalam berinteraksi dengan orang lain. Kehadiran teknologi informasi

(komputer/internet) tidak bisa lagi dihindari siap atau tidak siap kita harus menerima kehadirannya (Hartono, 2017).

5. Database *INLISLite*

INLISLite merupakan perangkat lunak (*software*) aplikasi automasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) sejak tahun 2011. Penamaan *INLIS* diambil dari kata *Integrated Library System*, nama dari perangkat lunak manajemen informasi perpustakaan terintegrasi yang dibangun sejak tahun 2003 untuk keperluan kegiatan rutin pengelolaan informasi perpustakaan di internal Perpusnas.

Seiring dengan perkembangan dunia perpustakaan, khususnya di Indonesia, Perpusnas memandang perlu untuk memfasilitasi semangat pengelola perpustakaan di seluruh daerah untuk memulai menerapkan automasi perpustakaan menuju terwujudnya perpustakaan digital, maka Perpusnas berinisiatif untuk mendistribusikan perangkat lunak ini dalam versi yang lebih ringan dengan nama *INLISLite*. *INLISLite* versi 3 merupakan pengembangan lanjutan dari perangkat lunak (*software*) aplikasi otomasi perpustakaan *INLISLite* versi 2.1.2 yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) sejak tahun 2011. *INLISLite* versi 3 dikembangkan sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan automasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital/mengelola dan melayani koleksi digital. (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2016) .

INLISLite dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh perpustakaan Nasional RI dalam rangka menghimpun koleksi digital koleksi nasional dalam jejaring Perpustakaan Digital Nasional Indonesia, disamping membantu upaya pengembangan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia yang didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- c. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 tentang serah simpan karya cetak dan rekam.

6. Karakteristik Database *INLISLite*

Adapun karakteristik dari database *INLISLite* antara Lain:

1. Mengikuti standar metadata *MARC* (*MAchine Readable Cataloguing*) dalam pembentukan katalog digitalnya.
2. Berbasis *web* (*webbased application software*), di mana dalam pengoperasiannya menggunakan aplikasi *browser internet* yang umum digunakan untuk menjelajahi informasi di internet.
3. Instalasi perangkat lunak *INLISLite* cukup dilakukan pada satu komputer yang difungsikan sebagai pangkalan data (*server*). Pengoperasian aplikasi cukup dilakukan melalui komputer kerja (*workstation*) dengan cara mengkoneksikannya melalui perangkat jaringan komputer, baik secara lokal (*Local Area Network*), antar wilayah (*Wide Area Network*), maupun Internet.
4. Dapat dioperasikan secara bersamaan dalam satu waktu secara simultan (*multi user ready*).
5. Bebas pakai / gratis (*freeware dan opensource*). (Perpustakaan Republik Indonesia, 2014).



7. Tujuan dan Manfaat *Database INLISLite*

INLISLite merupakan inisiatif Perpustakaan Nasional dalam rangka penyediaan sarana pendukung untuk :

1. Membantu pengembangan automasi perpustakaan di seluruh Indonesia,
2. Sebagai *tool* perpustakaan digital untuk mengelola koleksi full teks dan multimedia
3. Membantu dalam pembentukan katalog elektronik berbasis *MARC* untuk Indonesia (*INDOMARC*).
4. Melaksanakan program nasional yang diamanatkan kepada Perpustakaan Nasional untuk menghimpun data koleksi nasional dalam sebuah Katalog Induk Nasional (KIN) dan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Membantu pembentukan Katalog Induk Daerah (KID) dan Bibliografi Daerah (BiD) yang diselenggarakan oleh perpustakaan umum provinsi bersama mitra kerjanya di tingkat kabupaten dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

8. Cara Penggunaan *Database INLISLite*

INLISLite merupakan rangkaian modul sistem perpustakaan yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu modul untuk digunakan oleh *User* dan modul untuk

Administrasi. Pengertian *user* adalah orang atau petugas perpustakaan yang bertugas mengelola data perpustakaan sementara Administrasi adalah petugas yang membantu *user* memelihara sistem dari sisi administrasi seperti pendaftaran *user* ke dalam sistem, konfigurasi setting pada aplikasi dan lain-lain. Semua ini akan dibahas satu per satu pada sub-sub bahasan pada dokumen ini. (Perpustakaan Republik Indonesia, 2016) .

Modul-modul INLISLite versi 3 dikembangkan berdasarkan kritik, saran, dan usulan dari pengguna maupun pemerhati program aplikasi otomasi perpustakaan. Oleh karenanya program aplikasi ini telah dilengkapi dengan berbagai modul yang diharapkan sepenuhnya akan memenuhi kebutuhan sebuah perpustakaan terotomasi, serta mendukung pelayanan perpustakaan digital secara terpadu.

9. Portal Aplikasi INLISLite

Portal aplikasi INLISLite adalah antarmuka awal yang berisi tautan ke modul-modul yang dimiliki oleh INLISLite. Dengan disediakannya tautan modul ini, pengelola tidak perlu menghafal alamat http dari modul-modul yang akan dibuka pada sebuah komputer kerja.

10. Back Office

Back Office adalah sarana untuk mengelola data perpustakaan. Melalui modul ini pengelola perpustakaan melakukan penambahan, perubahan, bahkan menghapus data. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki akun (berupa username dan password) untuk dapat menggunakan modul back office ini.

11. Akuisi

Buku-buku yang ada di perpustakaan semuanya harus melalui proses Akuisisi terlebih dahulu. Proses Akuisisi ini bisa dilakukan dari hasil pengadaan perpustakaan sendiri yang berasal dari berbagai macam sumber, misalnya dengan pembelian langsung, bisa juga dari hibah atau sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain.

12. Katalog

Katalog yaitu suatu menu yang digunakan untuk mendaftarkan semua jenis koleksi atau bahan pustaka yang ada di perpustakaan yang disusun menurut aturan dan ketentuan tertentu.

13. Form Entri Katalog Sederhana

Katalog digital yang disimpan dalam pangkalan data Inlis Lite mengikuti standar metadata MARC. Struktur metadata MARC yang begitu rinci memunculkan kesan rumit bagi pengelola perpustakaan yang lebih mengedepankan simplifikasi

pekerjaan ketimbang kelengkapan data sebagaimana yang dianut oleh lembaga perpustakaan nasional. Untuk itu, Inlis Lite versi 3 menyediakan form entri katalog berbasis MARC yang disederhanakan, sehingga terlepas dari kesan rumit. Namun demikian, bagi 26 pengelola perpustakaan yang lebih advanced, tetap bisa membuat deskripsi bibliografis yang lebih rinci dengan form entri katalog berbasis MARC yang disediakan.

14. Keanggotaan

Modul yang digunakan untuk melakukan pendaftaran anggota pada perpustakaan.

15. Keanggotaan Online

Modul Keanggotaan Online merupakan sarana bagi Anggota untuk melihat profil dan aktifitasnya dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Melalui modul ini juga anggota dapat mengganti password keanggotaan, memutakhirkan data, bahkan berkontribusi untuk mengunggah karya ilmiahnya dalam bentuk digital jika pengelola memiliki kebijakan untuk itu.

16. Pendaftaran Anggota

Modul Pendaftaran Anggota adalah sarana registrasi anggota secara mandiri, baik di lingkungan local area network (LAN) ataupun melalui jaringan internet. Ruas-ruas yang dimunculkan dalam form pendaftaran anggota online ini dapat diatur melalui pengaturan pada modul Back Office sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis perpustakaan.

17. Sirkulasi

Sirkulasi biasa disebut sebagai layanan untuk melakukan kegiatan peminjaman dan pengembalian koleksi/bahan pustaka adalah bagian dari pelayanan perpustakaan. Koleksi yang telah diadakan dan diolah tentunya akan dimanfaatkan oleh anggota perpustakaan, salah satunya untuk dipinjam dan dibawa pulang hingga batas waktu yang ditentukan. Dengan tersedianya sarana otomasi untuk sirkulasi ini maka proses peminjaman dan pengembalian akan menjadi lebih cepat.

18. *Online Public Access Catalogue*

Online Public Access Catalogue (OPAC) adalah sarana bagi pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Modul OPAC INLISLite versi 3 telah dirancang dengan penampilan baru dan akan menyesuaikan bentuknya (*autoresponsive*) jika diakses dari perangkat bergerak seperti tablet dan smartphone. Cantuman-cantuman hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk ringkasan sehingga meminimalisir langkah

dalam menampilkan data. OPAC *INLISLite* versi 3 juga dilengkapi dengan *facet search* yang memandu pemustaka dalam mempersempit hasil pencariannya.

19. *Facet Search*

Pada Modul OPAC Data ringkas yang tampil pada hasil pencarian pada modul OPAC *INLISLite* versi 3 dibuat lebih ramah pengguna sehingga lebih informatif. *Facet search* disediakan sebagai sarana pendukung yang akan mempermudah pengguna mempersempit lingkup pencarian koleksi tanpa harus memikirkan kata kuncinya.

1. Modul yang bisa digunakan oleh *User*, terdiri dari

- a. Modul Akuisisi
- b. Modul Katalog
- c. Modul Keanggotaan
- d. Modul Sirkulasi
- e. Modul *Locker*
- f. Modul *Survey*
- g. Modul Buku Tamu
- h. Modul *Online Public Catalog (OPAC)*
- i. Modul Layanan Koleksi Digital
- j. Modul Baca di Tempat
- k. Modul Laporan



2. Modul Administrasi, terdiri dari:

- a. Setting Katalog
- b. Setting Akuisis
- c. Setting Keanggotaan
- d. Setting Sirkulasi

- e. Setting *Locker*
- f. Setting *OPAC*
- g. Setting LKD
- h. Setting Umum
- i. Setting Audio
- j. Setting *Sms Gateway*

Sebelum *user* mulai menggunakan aplikasi, sebaiknya semua setting konfigurasi awal pada menu Adminstrasi sudah dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan koreksi, tambah dan hapus data konfigurasi pada saat *user* sudah mulai melakukan input data sesuai kebutuhan pada saat itu. (Perpustakaan Republik Indonesia, 2014).

g. Fitur- Fitur *INLISLite*

INLISLite menyediakan beberapa fitur yang memudahkan pengolahan data dan meningkatkan pelayanan perpustakaan, antara lain (Afdan, 2016, p. 23):

1) Form Entri Katalog Sederhana

Bagi pengelola perpustakaan yang lebih mengedepankan simplikasi pekerjaan ketimbang kelengkapan data telah disediakan sebuah form entri katalog berbasis *MARC* yang telah disederhanakan. Namun, bagi pengelola perpustakaan yang lebih *advanced*, tetap bisa membuat deskripsi bibliografi yang lebih rinci dengan form entri katalog berbasis *MARC* yang disediakan.

2) Kardeks Terbitan Berkala

Untuk memudahkan pemantauan pengadaan koleksi majalah, buletin, surat kabar, dan sejenisnya.

3) Pilihan Model Kartu Anggota

Memungkinkan pengelola perpustakaan untuk memilih satu dari empat pilihan bentuk model *layout* kartu anggota yang tersedia.

4) *Facet Search* Pada Modul *OPAC*

Sebagai sarana pendukung yang akan mempermudah pengguna mempersempit lingkup pencarian koleksi tanpa harus memikirkan kata kuncinya dengan data yang lebih ringkas dan ramah pengguna.

5) *Autoresponsive*

Penampilan antarmuka modul akan disesuaikan dengan perangkat baca berukuran kecil agar lebih nyaman dilihat.

h. Aplikasi Pendukung *INLISLite*

1) *OAI-PMH Service*

Sebuah modul program kecil yang berfungsi sebagai sarana berkomunikasi data antar program aplikasi berbasis web dengan metode *harvesting* (panen/tarik data). Dengan terpasangnya modul *OAI-PMH service* ini maka perpustakaan pengguna aplikasi *INLIS Lite* versi 3 dapat menyediakan datanya secara *online* untuk dipanen /ditarik pangkalan data pusat jejaring perpustakaan seperti *Indonesia One Search*, Katalog Induk *INLISLite online*, Katalog Induk Bersama *online*, Katalog Induk Nasional *online*, dan sejenisnya. (Afdan, 2016, p. 27)

3) *SMS Gateway Service*

Sebuah modul program kecil yang berfungsi sebagai penghubung antara pangkalan data *INLISLite* versi 3 dengan perangkat komunikasi untuk melakukan pengiriman pesan singkat (*short message service*) sesuai dengan konfigurasi yang telah diatur, baik terjadwal maupun manual. Pesan singkat yang dimaksud berupa:

- a) Pengingat anggota peminjam koleksi yang telah mendekati jatuh tempo pengembalian
- b) Pengingat anggota peminjam koleksi yang telah melewati jatuh tempo pengembalian
- c) Promosi dan pemberitahuan tertentu kepada seluruh anggota perpustakaan (*broadcast*). (Afdan, 2016, p. 28)

4) *RFID Gateway Service*

Sebuah modul program kecil yang berfungsi sebagai penghubung antara pangkalan data *INLISLite* versi 3 dengan perangkat lunak peminjaman mandiri berbasis *RFID* yang menganut standar internasional protokol komunikasi *SIP2(Standard Interchange Protocol version 2)*.(Afdan, 2016)

5) Migrator Data *INLISLite* Versi 212 keVersi 3

Sarana pendukung dalam melakukan *upgrade* program aplikasi *INLISLite* versi 212 ke versi 3. Migrator Data *INLISLite* versi 212 ke Versi 3 berfungsi

sebagai pemindah data yang tersimpan pada pangkalan data *INLIS Lite* versi 212 ke pangkalan data *INLISLite* versi 3.

6) Kompetensi Pustakawan

Kompetensi pustakawan, akhir-akhir ini mendapat perhatian serius dan berbagai kalangan, khususnya dari para praktisi perpustakaan. Masalah ini menjadi semakin mendesak karena tuntutan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dinamis. Pada kenyataannya, kompetensi pun selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. *Special Libraries Association (SLA)* pada tahun 1996 merumuskan dua jenis kompetensi di abad 21 yang harus dimiliki para pendidik, mahasiswa, praktisi dan pegawai, yaitu kompetensi profesional dan kompetensi individu. Namun pada Juni 2003 (*SLA, 2003 : 2*) rumusan ini direvisi dan ditambah satu kompetensi inti atau *core competence*, yang merupakan pengait kompetensi profesional dan kompetensi individu.

Untuk mengetahui seorang pustakawan mempunyai kompetensi atau tidak, seberapa tingkat kompetensinya diperlukan adanya acuan. Acuan itulah yang disebut standar. Adanya standar kompetensi pustakawan sangat diperlukan. Paling tidak ada tiga pihak yang mempunyai kepentingan terhadap standar kompetensi pustakawan: Pertama adalah perpustakaan. Bagi perpustakaan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk merekrut pustakawan dan mengembangkan program pelatihan agar tenaga perpustakaan mempunyai kompetensi atau meningkatkan kompetensinya.

Kedua adalah lembaga penyelenggara sertifikasi pustakawan. Bagi lembaga sertifikasi pustakawan, standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian kinerja pustakawan dan uji sertifikasi terhadap pustakawan. Sedangkan pihak ketiga adalah pustakawan. Bagi pustakawan standar kompetensi pustakawan dapat dipergunakan sebagai acuan untuk mengukur kemampuan diri untuk memegang jabatan pustakawan yang menjadi salah satu persyaratan untuk memimpin suatu instansi atau lembaga perpustakaan.

Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang sedang dalam uji publik di beberapa daerah tertuang bahwa :

a. Kompetensi dan Sertifikasi

- 1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal
- 2) Kompetensi profesional mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja.
- 3) Kompetensi personal mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- 4) Pustakawan yang dinyatakan memiliki kompetensi, diberikan sertifikat kompetensi.
- 5) Pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi memperoleh tunjangan profesi.
- 6) Kompetensi Pustakawan secara lebih lanjut, diatur didalam Standar Kompetensi Pustakawan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Standar Kompetensi dan Sertifikasi diatas tentu perlu penyempurnaan dan masukan dari berbagai komponen khususnya pustakawan akan tetapi tidaklah salah sambil menunggu terbitnya standar kompetensi pustakawan, maka dipandang perlu mengetahui kompetensi apa yang seharusnya dipenuhi oleh seorang pustakawan. Ikatan Perpustakaan Khusus (*The Special Library Association*) pada tahun 2003 telah merumuskan kompetensi pustakawan. Walaupun rumusan tersebut sebetulnya di peruntukan bagi pustakawan yang bekerja di perpustakaan khusus, namun dapat dipergunakan sebagai acuan sementara dan tentunya memerlukan sedikit penyesuaian. Seperti sudah disebutkan di atas bahwa *The Special Library Association* membedakan kompetensi menjadi 2 jenis yaitu kompetensi profesional dan kompetensi personal/individu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Berikut adalah kompetensi profesional yang seharusnya dimiliki oleh pustakawan :

1. Memiliki pengetahuan keahlian tentang isi sumber-sumber informasi, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi dan menyaring sumber-sumber tersebut secara kritis.
2. Memiliki pengetahuan tentang subjek khusus yang sesuai dengan kegiatan organisasi pelanggannya.

3. Mengembangkan dan mengelola layanan informasi dengan baik, accessible (dapat diakses dengan mudah) dan cost-effective (efektif dalam pembiayaan) yang sejalan dengan aturan strategis organisasi.
4. Menyediakan bimbingan dan bantuan terhadap pengguna layanan informasi dan perpustakaan.
5. Memperkirakan jenis dan kebutuhan informasi, nilai jual layanan informasi dan produk-produk yang sesuai kebutuhan yang diketahui.
6. Mengetahui dan mampu menggunakan teknologi informasi untuk pengadaan, pengorganisasian, dan penyebaran informasi.
7. Mengetahui dan mampu menggunakan pendekatan bisnis dan manajemen untuk mengkomunikasikan perlunya layanan informasi kepada manajemen senior.
8. Mengembangkan produk-produk informasi khusus untuk digunakan di dalam atau di luar lembaga atau oleh pelanggan secara individu.
9. Mengevaluasi hasil penggunaan informasi dan menyelenggarakan penelitian yang berhubungan dengan pemecahan masalah-masalah manajemen informasi.
10. Secara berkelanjutan memperbaiki layanan informasi untuk merespon perubahan kebutuhan.
11. Menjadi anggota tim manajemen senior secara efektif dan menjadi konsultan organisasi di bidang informasi (Harmawan, Kompetensi Pustakawan: antara harapan dan kerisauan)

Lain halnya Standar Kompetensi Pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan Ilmuwan Informasi dan Asosiasi Pustakawan di Inggris yang disepakati oleh pustakawan internasional beberapa diantaranya adalah :

- 1) Pustakawan harus mampu menjangkau beragam komunitas perpustakaan dan informasi dan praktisi dalam segala bidang pada semua jenjang karir.
- 2) Pustakawan mendapat penghargaan atas kemampuannya pada tingkat professional
- 3) Pustakawan memiliki kode etik yang dapat memberikan jaminan layanan profesional pada publik pengguna

- 4) Pustakawan mendapat penghargaan dari lembaga pendidikan dan dilibatkan sebagai bagian dari pengembangan lembaga
- 5) Pustakawan menunjukkan kemampuannya pada mahasiswa, praktisi, pimpinan, pemerintah dan masyarakat
- 6) Pustakawan mempromosikan dan mendukung gagasan pembangunan profesional berkelanjutan untuk semua anggota asosiasi dengan membuat kerangka kerja dan program kesempatan berkarir (Agus Rusmana, Strategi Menuju Pustakawan Profesional)

Butiran-butiran di atas tidak semuanya harus dimiliki oleh seorang pustakawan. Kemampuan, yang harus dimiliki seorang pustakawan mesti disesuaikan dengan tingkatan atau levelnya. Sedangkan kompetensi personal/individu bagi pustakawan meliputi :

1. Memiliki komitmen untuk memberikan layanan terbaik.
2. Mampu mencari peluang dan melihat kesempatan baru baik di dalam maupun di luar perpustakaan.
3. Berpandangan luas.
4. Mampu mencari partner kerja.
5. Mampu menciptakan lingkungan kerja yang dihargai dan dipercaya.
6. Memiliki ketrampilan bagaimana berkomunikasi yang efektif.
7. Dapat bekerjasama secara baik dalam suatu tim kerja.
8. Memiliki sifat kepemimpinan.
9. Mampu merencanakan, memprioritaskan dan memusatkan pada suatu yang kritis.
10. Memiliki komitmen untuk selalu belajar dan merencanakan pengembangan kariernya.
11. Mampu mengenali nilai dari kerjasama secara profesional dan solidaritas.
12. Memiliki sifat positif dan fleksibel dalam menghadapi perubahan.

Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pustakawan didorong untuk berbenah diri dan terus berusaha meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, pustakawan harus mampu melaksanakan tugasnya, serta mampu memilih dan memilah informasi yang akan disajikan kepada masyarakat. Maka

dari itu, semua profesi tidak terkecuali profesi sebagai pustakawan harus memiliki kompetensi dalam menjalankan profesinya secara profesional.

Menurut Bambang Supriyo Utomo (2004), menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, sikap, nilai, perilaku dan karakteristik seseorang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dengan tingkat kesuksesan secara optimal.

Hasil Diskusi Komisi II Rapat Koordinasi Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI, merumuskan bahwa Kompetensi Secara Umum adalah “Kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan, sikap, nilai perilaku serta karakteristik pustakawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal”. (Sebagaimana dikutip dalam Zen, 2006, p.174).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang pustakawan harus memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan yaitu salah satunya di bidang teknologi dan informasi agar dapat memanfaatkan database perpustakaan sebagaimana mestinya.

B. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah

Pemerintah dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Sedangkan, dalam arti luas didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah serta menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

Pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat (Ndraha, 2000: 70). Menurut Rasyid (2000: 59) menyatakan bahwa, tugas pokok dapat diringkas

menjadi 3 fungsi hakiki yaitu: (1) pelayanan (service) yang akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, (2) pemberdayaan (empowerment) akan mendorong kemandirian masyarakat, dan (3) pembangunan (development) akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Selanjutnya fungsi pemerintahan juga dikemukakan oleh Ndraha (2000: 78), yaitu:

- a. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi
- b. Pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai provider penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan

Maka dapat disimpulkan, pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan pada masyarakat dalam hal masalah publik, serta fungsi pemerintahan agar mempermudah urusan public.

2. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 yaitu “Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tindakan baik dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 1 “Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka”

Selanjutnya, pada pasal 10 menjelaskan Pemerintah daerah berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. Mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. Mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing, sehingga adanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, sebagai lembaga penyedia informasi untuk kebutuhan pemustaka. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Bab V pasal 14 ayat 1 sampai dengan 7 adalah mengenai Layanan Perpustakaan, bahwa :

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Layanan perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka
- (6) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika. (Perpustakaan Nasional RI. 2010)

Mengacu pada Undang-Undang tersebut maka setiap perpustakaan termasuk juga Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang , tentunya berupaya mengimplementasikan amanat Undang-Undang tersebut khususnya Bab V mengenai layanan perpustakaan, pada ayat 3 menjelaskan “setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi”. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang memanfaatkan teknologi

dalam menggunakan sistem informasi perpustakaan INLISLite V.3 dalam melakukan kegiatan pengadaan, pengatalogan dan layanan perpustakaan.

C. Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelayanan Publik

Pelayanan adalah suatu sistem yang memenuhi sesuatu kebutuhan publik, diorganisasikan baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta (Homby, 2000). Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini dimaksudkan pelayanan publik adalah setiap instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga, independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan umum atau pelayanan publik menurut Wasistiono dalam Hardiansyah (2011: 11) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Adapun jenis pelayanan yang diberikan oleh pemerintah seperti bidang pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Menurut Mahmudi dalam Hardiansyah (2011: 20), pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu :

- a. Pelayanan kebutuhan dasar yang meliputi: kesehatan, pendidikan, dan bahan kebutuhan pokok
- b. Pelayanan umum yang meliputi: pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa.

Moentj (2006: 27) mengungkapkan bahwa pelayanan hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu ia merupakan proses. Dalam hal ini, pelayanan diartikan sebagai sebuah kegiatan. Sedangkan menurut Sampara dalam Sinambela (2010: 5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antarseseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Salah satu bidang pelayanan jasa yaitu perpustakaan. Perpustakaan merupakan lembaga penyedia informasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi

dengan berbagai koleksi cetak, non cetak ataupun fasilitas yang lain untuk mendukung proses temu kembali informasi dengan menerapkan sistem informasi perpustakaan INLISLite V.3 dalam pengelolaan data dan pelayanannya.

2. Kualitas Pelayanan Perpustakaan

Kualitas pelayanan perpustakaan merupakan tingkat baik atau buruk suatu pekerjaan yang diberikan kepada pemustaka dalam memenuhi kebutuhan informasinya. Menurut Feigenbaum dalam Nasution (2004: 41) kualitas adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suatu produk berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk/ atau jasa.

Menurut Garvin dan Danis dalam Nasution (2004: 41) kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/ atau tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Jasa adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produk jasa mungkin berkaitan dengan produk fisik atau tidak (Kotler dalam Nasution, 2004: 6). Pelayanan juga diartikan dengan jasa. Kualitas jasa merupakan suatu pembahasan yang sangat kompleks karena penilaian kualitas pelayanan berbeda dengan kualitas produk, terutama sifatnya yang tidak nyata (intangible) dan produksi serta komunikasi berjalan secara simultan. Sehingga, kualitas pelayanan adalah bagaimana tanggapan pelanggan terhadap jasa yang dikonsumsi atau dirasakannya (Jasfar, 2005: 47).

Kualitas pelayanan menurut Suwathi dalam Anwar (2002: 84) kualitas pelayanan adalah mutu dari pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal berdasarkan standar prosedur pelayanan. Kualitas pelayanan yang banyak dikenal adalah kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Zeithmal-Pasuraman berry dalam Rasolong (2008: 135) keputusan seseorang konsumen untuk mengonsumsi atau tidak mengonsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Dengan kata lain, baik buruknya kualitas pelayanan yang diberikan provider (penyedia layanan) tergantung pada persepsi konsumen atau pelayanan yang diberikan.

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maisarah mahasiswa UIN Arraniry program studi D III Ilmu Perpustakaan yang berjudul “Evaluasi Penggunaan Sistem Informasi *INLISLite* V.3 di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Hasil penelitiannya dijelaskan bahwa di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh telah memiliki sistem automasi dalam melayani temu kembali informasi bagi pemustaka yaitu adanya *database INLISLite* yang telah digunakan untuk mempermudah pemustaka dalam mencari segala koleksi yang ada di perpustakaan. Persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian di atas yaitu sama-sama membahas mengenai penggunaan *database INLISLite* yang dapat memudahkan pemustaka dalam menemukan bahan pustaka yang dibutuhkan secara cepat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang penulis teliti belum menggunakan *database INLISLite* secara optimal sedangkan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah menggunakan *database InlisLite* secara optimal. (Maisarah, 2017, p. 7)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Muh. Lukman pada tahun 2017 yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan Umum Berbasis *Web* Menggunakan *INLISLite*3.0 di Kab. Enrekang”. Hasil penelitiannya dijelaskan bahwa di perpustakaan umum Kabupaten Enrekang masih terdapat kekurangan mengenai informasi-informasi yang terdapat di perpustakaan umum. Tidak adanya sistem yang mempermudah masyarakat untuk mencari informasi membuat masyarakat Enrekang kesulitan dalam pencarian buku dan melihat koleksi buku yang ada di perpustakaan, khususnya bagi yang tempat tinggalnya jauh dari perpustakaan kabupaten Enrekang. Dengan merancang *database INLISLite* di perpustakaan kabupaten Enrekang dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi waktu serta biaya yang timbul dari kegiatan perpustakaan. Pemustaka dengan mudah mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke perpustakaan. Penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti sama-sama membahas mengenai *database INLISLite*. Akan tetapi perpustakaan Kabupaten Enrekang masih dalam proses merancang *database INLISLite* yang dapat memudahkan pemustaka dalam proses pencarian informasi yang dibutuhkan. Sedangkan penelitian yang diteliti membahas bagaimana penggunaan *database INLISLite* di Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Aceh Tamiang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hamid pada tahun 2015 yang berjudul “Penerapan *INLISLite (Integrated Library System)* di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan”. Hasil penelitiannya di jelaskan bahwa

di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan sudah menyediakan *database INLISLite* yang dapat memudahkan pemustaka dalam mencari sumber informasi yang mereka butuhkan. Akan tetapi, penerapan *database INLISLite* belum diterapkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Kendala utama dalam penerapannya yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang diteliti yaitu sama-sama menggunakan *database INLISLite*. Akan tetapi, terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu penelitian yang diteliti mempunyai kendala dalam penggunaan *database INLISLite* yaitu pemustaka lebih memilih mencari informasi yang dibutuhkan secara langsung ke rak buku dari pada menggunakan *database INLISLite*. Sedangkan di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan belum menggunakan *database INLISLite* secara optimal dikarenakan sumber daya manusia belum terpenuhi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zaini Halis Tahun 2016 dengan judul “Penerapan Program INLIS LITE dan Dampaknya Terhadap Akses Informasi Pengguna di Perpustakaan Umum Kabupaten Aceh Tengah”. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini ialah penerapan program inlis lite (X) dengan variabel terikat akses informasi pengguna (Y). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jumlah populasi 35 orang. Metode pengumpulan data dengan angket, dan observasi. Analisis data regresi linier. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan program inlis lite (X) mempunyai pengaruh sedang dengan akses informasi pengguna (Y) $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{hitung} sebesar 2,993 dan t_{tabel} sebesar 1,690. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan “Penggunaan Database INLISLITE di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Tamiang” antara lain, lokasi yang diangkat berbeda, teknik pengumpulan data ini tidak menggunakan angket, tetapi menggunakan penelitian lapangan yang berupa pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Persamaan milik Zaini Halis (2016) dengan penelitian ini masalah yang diangkat yaitu penerapan inlislite. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan program inlis lite (X) mempunyai pengaruh sedang dengan akses informasi pengguna (Y) $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai t_{hitung} sebesar 2,993 dan t_{tabel} sebesar 1,690.